

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Kedekatan organisasi pemerintah pada level daerah diharapkan lebih mampu menerima aspirasi riil masyarakat tentang pelayanan apa yang dibutuhkan. Organisasi pemerintah daerah (Pemda) merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik (Zurnelia Sari, 2013).

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 ayat (1) ; menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada ayat (2); menyatakan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pada peraturan ini juga dijelaskan semua pendaan yang diperlukan bagi pelaksanaan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

Pada saat ini sudah banyak program-program penanggulangan kemiskinan yang semua sumber pendanaanya berasal dari APBN/APBD. Program yang sudah dilaksanakan seperti Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP/PNPM), Program Pengembangan Kecamatan (PPK/PNPM), Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP), Program Prakarsa Pembangunan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Kredit Usaha Tani

(KUT), Penyediaan beasiswa bagi keluarga miskin, memberikan perhatian atau tekanan pada kegiatan-kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan / perumahan, kegiatan sosial (pelatihan / beasiswa), peningkatan kemampuan dan keterampilan peningkatan akses dan layanan bagi pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah mengalokasikan dana anggaran yang cukup besar untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik dalam bentuk belanja hibah, belanja bentuk sosial maupun dalam bentuk program/kegiatan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mempercepat program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mulai Tahun 2007 telah memberikan Kredit Mikro Nagari/Kelurahan (KMN/KMK) berupa bantuan modal usaha bagi keluarga miskin pada Nagari/Kelurahan. Program KMN/KMK ini merupakan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan sharing dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2008 pemerintah daerah Kota Padang sudah merealisasikan alokasi dana anggaran melalui program KMN/KMK di 50 kelurahan di Kota Padang, dengan masing-masing kelurahan memperoleh dana sebesar Rp. 300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 50 kelurahan sebesar Rp 15.000.000.000,-. Namun setelah dilakukan evaluasi ternyata pengelolaan melalui program KMN/KMK kurang efektif. Berkaca dari program tersebut yang mengalami kegagalan, maka Pemerintah Kota Padang pada tahun 2010 merealisasikan alokasi anggaran Kredit Mikro Kelurahan (KMK) melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Padang Amanah Sejahtera.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Padang Amanah Sejahtera ini merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah, yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. KJKS BMT merupakan **Lembaga Keuangan Mikro Simpan Pinjam** dengan badan hukum Koperasi yang pengelolaannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem Syariah atau pola bagi hasil. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi sosial dan demografi masyarakat Kota Padang yang sebagian besar beragama Islam (96% penduduk Kota Padang beragama Islam) yang hidup berazaskan **Adat Basandi**

Sarak dan Sarak Basandi Kitabullah.

Program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui koordinasi TKPKD Kota Padang dengan Visi “Menjadikan Lembaga Keuangan Mikro syariah sebagai LKM yang profesional, amanah, maju modern dan mandiri yang sejalan dengan ajaran Islam serta Adat dan Budaya Minangkabau. Pada tahun 2010 tersebut Pemerintah Kota Padang merealisasikan anggaran KMK melalui KJKS BMT di 54 kelurahan, dengan masing-masing kelurahan memperoleh dana sebesar Rp 300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 54 kelurahan sebesar Rp 16.200.000.000,-. Alokasi dana anggaran ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.

Kondisi Penduduk Miskin Kota Padang berdasarkan data dari BPS Kota Padang pada tahun 2010 sebanyak 52.800 jiwa, tahun 2011 sebanyak 50.900 jiwa, tahun 2012 sebanyak 45.600 jiwa, tahun 2013 sebanyak 44.200 jiwa, tahun 2014 sebanyak 40.700 jiwa, tahun 2015 sebanyak 44.300 jiwa dan pada tahun 2016 sebanyak 42.560 jiwa. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa penduduk miskin berfluktuatif. Kondisi ini menggambarkan belum optimalnya program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Namun belum dapat dipastikan apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak. Jika program dari pemerintah ini berjalan dengan baik maka seharusnya berdampak positif bagi tingkat pertumbuhan kemiskinan, dimana jumlah masyarakat miskin akan mengalami penurunan. Disamping itu, diharapkan program ini mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah sesuai dengan salah satu visi dan misi program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka peneliti perlu mengetahui bagaimana kinerja program yang dibuat oleh pemerintah ini, agar apa yang diharapkan tercapai, tidak mengalami kegagalan seperti program sebelumnya. Pengukuran kinerja ini sangat penting dilakukan karena hal itu diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pengukuran kinerja untuk program ini dilakukan dengan memperhatikan informasi nonfinansial, hal itu dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi, misi, dan strategi yang ada.

Dengan adanya system pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya suatu program /kegiatan (Mardiasmo, 2002).Di Kota Padang sendiri program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini sudah berjalan lebih kurang enam tahun.Yang mana dikelola oleh manager dan pembukuan serta pendampingan langsung dari Dinas Koprerasi dan UMKM Kota Padang. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul“ Analisis Kinerja KJKS BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang “.

B. Rumusan Masalah

Pembangunan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Dalam hal ini KJKS BMT merupakan program pemerintah yang berorientasi pada lembaga keuangan syariah yang dapat membantu masyarakat khususnya RTM dalam pengembangan usaha mikro yang dijalankannya dengan cara pemberian bantuan modal yang berupa modal dana.

KJKS BMT yang ada saat ini telah berjalan sejak tahun 2010, untuk melihat kinerja KJKS BMT dalam Program Pengentasan kemiskinan maka perlu dilakukan evaluasi kerja program dimaksud. Maka dari itu pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja KJKS BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil) di Kota Padang ?
2. Bagaimana Pengaruh Total Pinjaman, Durasi Keanggotaan dan Lama Usaha Anggota terhadap Pendapatan rumah tangga miskin anggota KJKS BMT di Kota Padang?
3. Apakah KJKS BMT berperan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kinerja KJKS BMT di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis pengaruh Total Pinjaman, Durasi Keanggotaan dan Lama Usaha terhadap Pendapatan RTM anggota KJKS BMT Di Kota Padang.
3. Mendeskripsikan Peran KJKS BMT dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu sosial dalam masalah pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemahaman terhadap proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan serta memberikan sumbangan informasi bagi instansi yang terkait dan pihak-pihak lain baik di kota maupun di desa.



E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi thesis serta untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembatasan masalah maka thesis ini harus disusun secara sistematis. Sistematika penulisan thesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan dan Kemiskinan, serta hipotesa penelitian.

BAB III. Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan dibahas mengenai metoda penelitian, terutama sumber data yang dibutuhkan serta proses pengumpulan, pengolahan dan analisa data.

BAB IV. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Merupakan bab gambaran umum lokasi penelitian, berisi uraian atau gambaran secara umum mengenai obyek penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V. Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang uraian dan hasil penelitian. Pembahasan bab ini diutamakan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam Bab I.

BAB VI. Kesimpulan, Saran dan Implikasi Kebijakan

Bab terakhir dari penulisan ini berisi kesimpulan dan saran mengenai segala hal yang telah dibahas dalam Bab V.

